

MEMAHAMI EKOLOGI MEDIA MASSA DARING MELALUI ANALISIS JARINGAN WACANA RUU DKJ

Reza Praditya Yudha¹, Asyami Destriana Putri²
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma^{1,2}
rezapraditya@staff.gunadarma.ac.id¹, assyamidestrianaputri@gmail.com²

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengkaji bentuk ekologi media pada media massa daring. Dalam ekologi media, setiap media memiliki karakter, fungsi, dan sentimen masing-masing. Ekologi media berimplikasi pada pembentukan budaya dan opini audiens yang khas. Peneliti menggunakan metode *discourse network analysis* untuk memetakan aktor dan narasi media. Peneliti kemudian mengkaji gaya narasi media dengan *Discourse Coalition Framework*. Peneliti mengkomparasi berita tentang Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) di KOMPAS.com dan CNN Indonesia mulai tanggal 14 Februari hingga 14 Maret 2024. Hasil studi menunjukkan bahwa pada periode yang sama, berita KOMPAS.com lebih banyak daripada CNN Indonesia. Kedua media memuat pernyataan narasumber yang memiliki sentimen positif dan negatif. Kedua media juga mengutip pernyataan narasumber dan melakukan proliferasi dengan mengunggah pada dua berita berbeda. Narasumber dan gaya narasi CNN Indonesia lebih beragam, meliputi metafora, alur cerita, dan koalisi. Sedangkan KOMPAS.com mengutip pernyataan dari aktor yang lebih sedikit dengan gaya narasi alur cerita dan koalisi.

Kata kunci: Analisis Jaringan Wacana, CNN Indonesia, Discourse Coalition Framework, Ekologi Media

PENDAHULUAN

Media komunikasi telah berintegrasi dengan teknologi digital. Integrasi tersebut meningkatkan kemampuan digital, memudahkan akses, dan operasional media. Cendekiawan berargumen, masyarakat menggunakan media digital untuk berbagai aspek sosial (Kortti, 2017). Misalnya, masyarakat menggunakan media untuk bersosialisasi, berbisnis, belajar, bahkan berpartisipasi dalam diskusi sosial (Made et al., 2024). Termasuk, masyarakat menggunakan media massa daring sebagai sarana mendapatkan informasi politik.

Transformasi media massa daring mengubah cara masyarakat berinteraksi, mengonsumsi, dan merespons informasi (Lubis et al., 2024). Media massa tidak lagi sekadar sebagai *platform* untuk mengetahui berita. Tetapi, media massa daring telah berkembang menjadi entitas yang terlibat dalam proses pembentukan opini publik dan budaya audiens (Abu-Ayyash, 2024). Salah satu perubahan penting yang terjadi adalah konvergensi media. Cendekiawan mendefinisikan konvergensi sebagai penggabungan berbagai format media (teks, gambar, video) dalam satu *platform*. Masyarakat kemudian mengakses media digital melalui perangkat seperti ponsel pintar atau komputer.

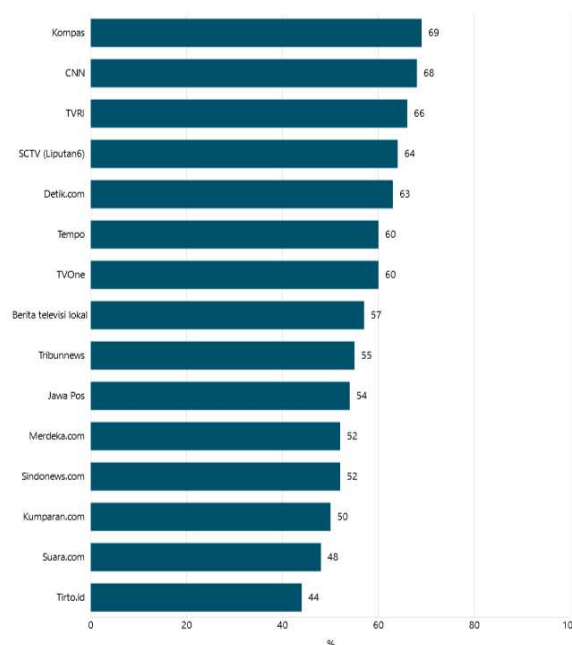
Sekalipun jumlah media dan informasi meningkat, tiap media memiliki karakteristik, fungsi, dan narasi yang khas. Cendekiawan mengistilahkan karakter, fungsi, dan gaya narasi khas yang melekat pada tiap media sebagai ekologi. Adanya ekologi media membentuk cara informasi disajikan dan diinterpretasikan (Dame Laoera & Wibowo, 2023). Dengan kata lain, ekologi media berimplikasi pada pembentukan opini publik serta budaya pengguna yang khas. Pemahaman tentang ekologi media menjadi

krusial karena dapat memengaruhi cara audiens merespons isu-isu sosial, ekonomi, atau politik.

Dalam konteks penyebaran informasi politik, di Indonesia peristiwa politik memiliki nilai berita yang tinggi. Peristiwa politik hampir selalu menjadi perhatian media massa dan masyarakat umum karena beberapa faktor sosial yang saling berkaitan (Hamad, 2004). Faktor pertama, politik berada pada era mediasi (*politics in the age of mediation*). Artinya, interaksi politik antara politisi elit dengan khalayak membutuhkan media massa sebagai mediator. Fungsi media dalam hal ini adalah sebagai sarana untuk mempertemukan dan mengartikulasi ide masing-masing pihak. Faktor kedua, peristiwa politik dalam bentuk tingkah laku dan pernyataan politisi selalu memiliki nilai berita. Sekalipun peristiwa politik terjadi rutin, namun masyarakat tetap memberi perhatian pada sebuah proses perebutan kekuasaan.

Salah satu peristiwa politik yang menarik adalah pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ). Keberadaan RUU DKJ merupakan respons Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN) UU No. 3/2022 yang disahkan pada 03 Oktober 2023. UU IKN mengatur pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Daerah Otorita IKN yang terletak di provinsi Kalimantan Timur. Pemindahan ibu kota menjadikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta tidak lagi relevan. Sehingga perlu ada aturan hukum baru untuk mengganti UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta.

Dalam RUU DKJ, terdapat salah satu pasal yang memunculkan pro dan kontra, yaitu Pasal 10 Ayat 2. Pasal tersebut menyebutkan, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta tidak lagi dipilih rakyat melainkan ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden. Para ahli, politisi, dan akademisi saling memberi pernyataan di media terkait Pasal 10 Ayat 2 tersebut.

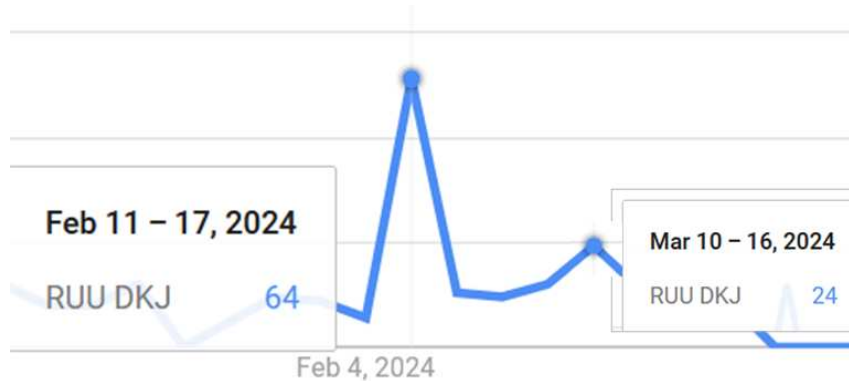


Gambar 1: Merek Media yang Paling Dipercaya Responden

Sumber: (Katadata Insight Center, 2023a)

Studi ini mengkaji bentuk ekologi media pada KOMPAS.com dan CNN Indonesia. Studi ini juga menggunakan metode Analisis Jaringan Wacana dan kerangka

teoretis *Discourse Coalition Framework* untuk memahami cara kedua media memberitakan RUU DKJ. Peneliti membatasi pemberitaan dari 14 Februari hingga 14 Maret 2024. Pada periode tersebut, pemberitaan tentang RUU DKJ mengalami kenaikan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2: Tren *Engagement* Media
Sumber: Olahan Peneliti

Studi ekologi media penting untuk dilakukan agar audiens memahami karakter dan gaya narasi masing-masing media. Demikian pula, analisis *Discourse Coalition Framework* penting untuk memahami bagaimana media massa daring, dengan ekologi media yang unik dapat memengaruhi pandangan dan persepsi publik terhadap isu-isu sosial dan politik.

Namun demikian, studi ekologi media belum banyak dilakukan, terutama pada media massa daring. Padahal, studi ekologi media juga berimplikasi pada kajian persepsi, *engagement*, dan budaya media audiens. Peneliti berharap, studi ini dapat memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana ekologi media membentuk gaya narasi media serta persepsi audiens atas informasi yang disajikan.

TINJAUAN PUSTAKA

Konvergensi dan Ekologi Media

Kemajuan media komunikasi terkait dengan perkembangan teknologi internet. Integrasi antara media komunikasi dan internet mengembangkan format informasi digital. Dalam format digital, media massa lebih mudah menyebarkan informasi atau konten secara daring. Tampilan konten digital juga lebih menarik karena dapat menggabungkan format teks, audio, dan visual (konvergensi media).

Data menunjukkan, pengguna internet secara global per Januari 2024 naik 97 juta jiwa (1,8%) dari 5,35 milyar orang di tahun 2023. Kenaikan tersebut adalah signifikan mengingat total populasi dunia yang mencapai 8,08 milyar pada 2024. Di Indonesia, DataReportal mencatat jumlah pengguna internet adalah sebanyak 212,9 juta pada 2024 (Kemp, 2024). Jumlah tersebut berarti mencapai 77% dari total populasi Indonesia yang berjumlah 278,7 juta jiwa. DataReportal menambahkan, durasi orang Indonesia dalam mengakses internet setiap harinya mencapai 7 jam, 38 menit.

Kemp (2024) melansir, 83,1% pengguna di Indonesia memanfaatkan internet untuk mencari informasi. Termasuk, pengguna menggunakan internet untuk mengetahui perkembangan politik. Sementara, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia/APJII menyatakan, sebanyak 65,02% pengguna internet Indonesia adalah Gen-Z dan Generasi

milennial (Haryanto, 2024). Data Katadata Insight Center (KIC) menunjukkan, sejumlah 66,6% Gen-Z dan 70,1% Generasi Milennial pada kondisi sering terpapar berita politik (Katadata Insight Center, 2023b). Sumber berita politik ini mereka dapatkan dari media sosial berita daring (80,4%), televisi (44,6%), dan portal berita daring (36,6%).

Konvergensi media juga berimplikasi pada kemudahan audiens dalam mengonsumsi informasi digital (Setiadarma & Rizkiansyah, 2021). Audiens dalam sebuah perangkat dapat mengakses berita daring yang berisi teks, foto, video, infografis, bahkan komentar pemirsa lain. Di sisi lain, konvergensi memiliki dampak buruk. Cendekiawan menjelaskan, audiens yang menerima terpaan terlalu banyak berita berpotensi mengalami kebingungan informasi. Selain itu, konvergensi media secara negatif juga menciptakan silang pengaruh. Artinya, konten dari satu platform dapat mempengaruhi agenda atau kebijakan editorial dari platform lain. Dalam hal ini, audiens berisiko mendapatkan informasi yang bias (Modgil et al., 2024).

Analisis Jaringan Wacana dan *Discourse Coalition Framework*

Salah satu dari enam pendekatan analisis wacana yang menjelaskan wacana argumentative adalah melalui *Discourse Coalition Framework* (DCF). Kerangka DCF berasal dari bidang *interpretive policy analysis* (IPA) (Glynos et al., 2009) yang memiliki fokus pada identifikasi strategi retorik. Dengan kata lain, DCF mengkaji cara-cara aktor memperkuat posisi, mempengaruhi opini, dan membentuk persepsi audiens. Analisis DCF tidak hanya memahami isi argumen. Akan tetapi DCF juga mengkaji penyajian argumen melalui gaya dan teknik retorik (Kasih, 2023).

Kerangka DCF mengkategorisasi tiga gaya argumentasi aktor narasi media; yaitu metafora, koalisi, dan alur cerita (Hajer, 2002). Pertama, metafora, adalah perangkat retorik untuk menghubungkan dua konsep yang berbeda. Gaya argumentasi metafora membandingkan substansi informasi secara implisit. Dalam konteks wacana argumentatif, metafora sering kali digunakan untuk menyederhanakan isu yang kompleks atau mengarahkan opini publik dengan cara lebih emosional dan intuitif. Metafora memungkinkan aktor untuk meringkaskan sebuah masalah dalam istilah yang lebih familiar bagi audiens. Sehingga, gaya argumentasi metafora pada umumnya lebih mudah dipahami dan diterima audiens.

Kedua, koalisi dalam wacana argumentatif mengacu pada gabungan atau aliansi antara berbagai aktor yang mendukung argumen tertentu. Aktor-aktor ini dapat berupa politisi, akademisi, atau tokoh publik yang berbicara atau bertindak atas isu yang sama. Koalisi membentuk wacana publik karena mereka menciptakan kesan adanya dukungan yang lebih luas terhadap sebuah argumen atau posisi.

Ketiga, alur cerita adalah struktur naratif untuk menyusun fakta-fakta dan peristiwa dalam sebuah cerita yang lebih kohesif dan mudah dipahami. Dalam wacana argumentatif, alur cerita membantu audiens memahami sebuah isu dengan cara yang lebih linear dan terarah. Alur cerita melibatkan tokoh-tokoh penting, konflik, serta penyelesaian. Gaya argumentasi ini mirip dengan cerita atau kronologi film. Dalam konteks berita politik, tentu saja alur cerita seharusnya dibangun atas peristiwa faktual.

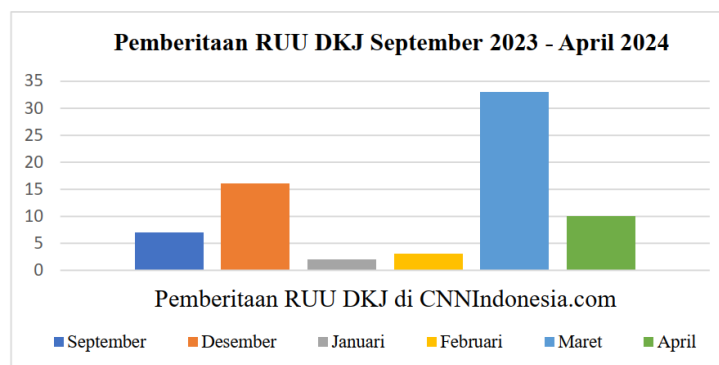
METODELOGI PENELITIAN

Studi ini mengimplementasikan Analisis Jaringan Wacana untuk memetakan aktor-aktor politik yang terhubung dalam diskusi terkait RUU DKJ. Peneliti

menggunakan aplikasi *Discourse Network Analyzer* versi 3.0.11 untuk mengorganisasikan data dan *Visone* versi 2.28 untuk memvisualisasikan data. Studi ini juga menggunakan *Discourse Coalition Framework* sebagai landasan untuk menganalisa gaya argumentasi aktor. KOMPAS.com dan CNN Indonesia sebagai media massa paling populer di Indonesia (Katadata Insight Center, 2023a) menjadi objek penelitian. Peneliti juga membatasi periode pemberitaan mulai 14 Februari-14 Maret 2024 demi memahami perbedaan pendekatan keduanya pada satu isu yang sama.

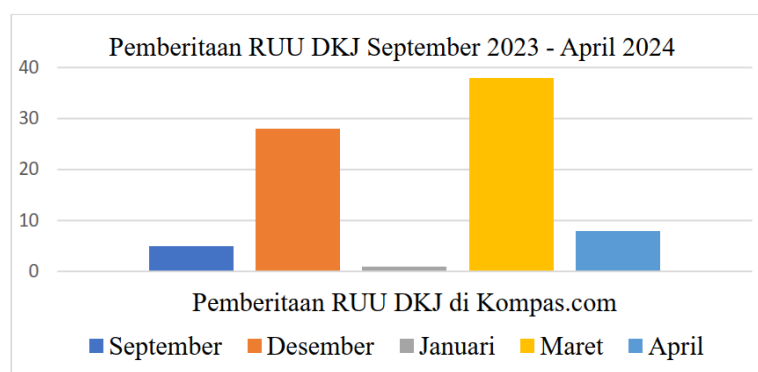
HASIL DAN DISKUSI

CNN Indonesia mulai mengunggah berita tentang RUU DKJ sejak 14 September 2023. Akan tetapi, CNN Indonesia mulai konsisten mengunggah pemberitaan tentang RUU DKJ pada Maret 2024 sebagaimana tampak pada Gambar 3. Bahkan, pada November 2023, tidak ada satu pun berita tentang RUU DKJ di CNN Indonesia.



Gambar 3: Pemberitaan RUU DKJ di CNNIndonesia.com
Sumber: Olahan Peneliti

Sementara, Kompas.com menerbitkan berita tentang RUU DKJ sejak 13 September 2023. Pada Gambar 4 tampak pemberitaan paling banyak pada Maret 2024. KOMPAS.com menerbitkan 38 berita terkait RUU DKJ pada 1 Maret – 29 Maret 2024.






Gambar 4: Pemberitaan RUU DKJ di KOMPAS.com
Sumber: Olahan Peneliti

CNN Indonesia menerbitkan lima berita yang membahas RUU DKJ pada periode 14 Februari 2024 - 14 Maret 2024. Sejumlah tiga berita membahas tentang pasal

kontroversial Rancangan Undang-undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ). Tabel 1 menunjukkan tangkapan gambar dan isi berita.




Tabel 1: Berita tentang RUU DKJ di CNN Indonesia tanggal 14 Februari-14 Maret 2024

No	Berita	Isi
1	 <p>Ketua Baleg DPR: UU Berakhir, DKI Tak Ada Status Sejak 15 Februari CNN Indonesia Selasa, 05 Mar 2024 16:35 WIB</p> <p>Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Agtas. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)</p>	<p>Pada 05 Maret 2024 CNN Indonesia memuat pernyataan ketua badan legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas bahwa status DKI Jakarta sebagai ibu kota negara habis pada 15 Februari 2024.</p>
2	 <p>Pakar Hukum: Jakarta Sudah Kehilangan Status Ibu Kota CNN Indonesia Kamis, 07 Mar 2024 06:50 WIB</p> <p>DKI Jakarta mengalami kekosongan hukum terkait status ibu kota karena UU IKN mengatur agar UU DKI direvisi setelah dua tahun IKN diundangkan. (CNN Indonesia/Andry Novelino)</p>	<p>Pada 07 Maret 2024 CNN Indonesia memuat pernyataan pakar hukum tata negara UNS Agus Riwanto tentang kekosongan status hukum DKI Jakarta sebagai ibu kota.</p>
3	 <p>Buru-buru Menuju Daerah Khusus Jakarta KRONIK Khaira Ummah CNN Indonesia Jumat, 08 Mar 2024 07:15 WIB</p> <p>1. Buru-buru Menuju Daerah Khusus Jakarta</p>	<p>Pada 08 Maret 2024 CNN Indonesia memuat pernyataan anggota badan legislasi (Baleg) DPR RI Guspardy Gaus. Narasumber memaparkan, sembilan fraksi di DPR sepakat mengusulkan Rancangan Undang-undang (RUU) baru untuk DKI Jakarta.</p>

Sumber: Olahan Peneliti

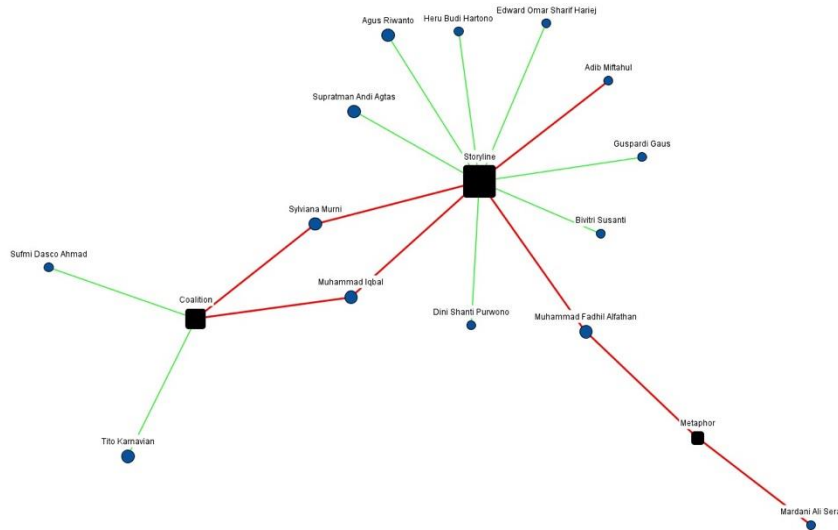
Sedangkan KOMPAS.com menerbitkan enam berita tentang RUU DKJ pada periode 14 Februari 2024 - 14 Maret 2024. Sejumlah empat berita diantaranya membahas tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta yang masih belum jelas dalam RUU DKJ. Tabel 2 berikut menunjukkan tangkapan gambar dan isi berita di KOMPAS.com.

Tabel 2: Berita tentang RUU DKJ di KOMPAS.com tanggal 14 Februari-14 Maret 2024

No	Berita	Isi
1	 <p>KOMPAS.com Mahfud Sebut Isi RUU DKJ Mengecohkan, Presiden Bisa Cawacawe Pilih Gubernur Jakarta Kompas.com, 1 Maret 2024, 11:26 WIB Achmad Nasrudin Yahya Penulis 4 39</p>	Pada 01 Maret 2024 KOMPAS.com menerbitkan pernyataan Mahfud MD yang menyebutkan beberapa pasal mengecoh dalam RUU DKJ.
2	 <p>KOMPAS.com DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat, Bukan Presiden Kompas.com, 5 Maret 2024, 12:01 WIB Adhyasta Dargantara, Kitiandi Tim Redaksi 4 27</p>	Pada 05 Maret 2024, KOMPAS.com memuat pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang menegaskan Gubernur DKI Jakarta akan tetap dipilih oleh rakyat, bukan Presiden.
3	 <p>KOMPAS.com Kontroversi RUU DKJ, Gelagat Politik Lebih Dinantikan Ketimbang Statment Politik Kompas.com, 12 Maret 2024, 23:40 WIB Achmad Nasrudin Yahya Penulis 2</p>	Pada 12 Maret 2024 KOMPAS.com memuat pernyataan Direktur Monitoring Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia Jojo Rohi yang mengaku lebih menantikan gelat politik ketimbang statemen politik para pemangku kepentingan.

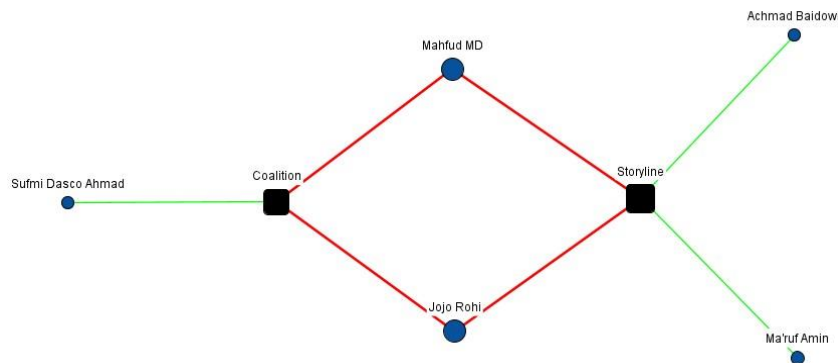
Sumber: Olahan Peneliti

Pada Gambar 5 berikut, tampak hasil pemetaan aktor dan wacana dalam pemberitaan CNN Indonesia terkait RUU DKJ tanggal 14 Februari 2024-14 Maret 2024. Aktor paling aktif tampak dari tanda node biru yang berukuran besar. Demikian pula, gaya alur cerita (*storyline*) nampak berukuran paling besar. Hal tersebut berarti alur cerita menjadi gaya argumentasi yang paling sering digunakan oleh para aktor.



Gambar 5: Pemberitaan RUU DKJ di CNN Indonesia
 Sumber: Olahan Peneliti

Sedangkan pada Gambar 6 di bawah ini, tampak peta aktor dan wacana dalam pemberitaan KOMPAS.com terkait RUU DKJ tanggal 14 Februari 2024-14 Maret 2024. Aktor dan gaya argumentatif yang disajikan KOMPAS.com lebih sedikit daripada pemberitaan CNN Indonesia. KOMPAS.com tidak memuat pernyataan aktor yang menggunakan gaya metafora.



Gambar 6: Pemberitaan RUU DKJ di KOMPAS.com
 Sumber: Olahan Peneliti

Gaya argumentasi aktor menggunakan metafora hanya dimuat oleh CNN Indonesia. Tabel 3 berikut menunjukkan contoh pernyataan dengan gaya metafora. CNN Indonesia memuat ketiga pernyataan berikut dalam satu berita berjudul “Buru-buru Menuju Daerah Khusus Jakarta” yang terbit pada 8 Maret 2024. Pada berita tersebut, CNN Indonesia menulis berita yang lengkap dengan kronologi pembahasan RUU DKJ. Sementara, tidak ada pernyataan aktor bergaya metafora yang dimuat KOMPAS.com.

Tabel 3: Gaya Argumentasi Metafora pada CNN Indonesia

No	Pernyataan	Aktor	Institusi	Sumber	Tanggal
----	------------	-------	-----------	--------	---------

1	“Saya menilai ini <i>mengebiri</i> hak rakyat, sehingga kami PKS menolak RUU DKJ ini karena ada Pasal 10 Ayat 2 ini”.	Mardani Ali Sera	Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS	CNN Indonesia	8 Maret 2024
2	“Ada yang <i>gelap</i> , kalau di Komisi II ini masih inisiatifnya temen-temen pemerintah tetapi ketika di Baleg berubah jadi inisiatifnya DPR”.	Mardani Ali Sera	Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS	CNN Indonesia	8 Maret 2024
3	“Yang bisa dijelaskan secara politis saja, ada tarik ulur nih berati. Ada <i>tarik menarik</i> kepentingan untuk mendeterminasi RUU DKJ”.	Muhammad Fadhil Alfathan	LBH Jakarta	CNN Indonesia	8 Maret 2024

Sumber: Olahan Peneliti

Aktor yang terlibat dalam diskusi RUU DKJ paling banyak menggunakan gaya argumentasi alur cerita. Pada Tabel 4 di bawah ini, tampak beberapa contoh pernyataan aktor dengan gaya alur cerita di KOMPAS.com dan CNN Indonesia. Pernyataan alur cerita biasa memuat informasi-informasi teknis, menggambarkan proses, atau kronologis. Meskipun aktor dapat memilih informasi apa yang disampaikan, namun gaya argumen alur cerita terkesan lebih netral karena disampaikan dengan bahasa denotatif. Selain itu, pernyataan aktor juga terkesan objektif dan faktual karena tidak menggunakan diksi yang subjektif atau asumptif. Biasanya, akademisi, pakar, atau pemerintah lebih sering menggunakan gaya argumentasi alur cerita.

Tabel 4: Gaya Argumentasi Alur Cerita pada KOMPAS.com dan CNN Indonesia

No	Pernyataan	Aktor	Institusi	Media	Tanggal
1	“Sekali lagi, ini baru draf RUU, insya Allah besok kalau kita sepakat menggunakan hari Jumat untuk melakukan rapat kerja, insya Allah selesai (kekhususan Jakarta).	Achmad Baidowi	Sekretaris Fraksi PPP	KOMPAS.com	14 Maret 2024
2	Sekarang sedang diproses itu pembentukan RUU DKJ namanya. Jadi Jakarta tidak lagi menjadi Ibu Kota, tidak lagi menjadi DKI tapi menjadi Daerah Khusus Jakarta.	Ma'ruf Amin	Wakil Presiden	KOMPAS.com	13 Maret 2024
3	RUU DKI itu dia kehilangan statusnya tanggal 15 Februari kemarin. Kan itu	Supratman Andi Agtas	Ketua Badan Legislasi	CNN Indonesia	5 Maret 2024

implikasi dari Undang-undang IKN. Iya dua tahun [setelah UU IKN diundangkan]. Nah, [UU DKI] itu kan berakhir 15 Februari

(Baleg)
DPR

Sumber: Olahan Peneliti

Berikutnya, Tabel 5 menunjukkan beberapa contoh pernyataan aktor dengan gaya argumentasi koalisi. Baik CNN Indonesia dan KOMPAS.com mengutip pernyataan aktor yang menunjukkan afiliasi, representasi, atau dukungan kelompok tertentu. Gaya argumentasi koalisi dapat menciptakan kesan identitas atau penempatan kelompok sekaligus liyan.

Tabel 5: Gaya Argumentasi Koalisi pada KOMPAS.com dan CNN Indonesia

No	Pernyataan	Aktor	Institusi	Media	Tanggal
1	Oleh sebab itu masyarakat harus mengawal dan saya berharap kepada partai-partai besar tetap menolak gagasan pemlihan kecuali pemilihan langsung seperti biasa. Itu harus kita kawal bersama untuk demokrasi dan keadilan kita.	Mahfud MD	Mantan Menko Polhukam	KOMPAS.com	1 Maret 2024
2	Saya sendiri tidak melihat bahwa ada urgensi yang cukup mendesak bahwa ini harus segera dibahas, apalagi dengan agenda untuk mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah.	Jojo Rohi	Direktur Monitoring KIPP	KOMPAS.com	12 Maret 2024
3	Sekali lagi, karena dari awal draf kami, draf pemerintah sikapnya dan drafnya juga isinya sama, dipilih bukan ditunjuk	Tito Karnavian	Mendagri	CNN Indonesia	13 Maret 2024

Sumber: Olahan Peneliti

Baik KOMPAS.com dan CNN Indonesia memuat pernyataan aktor yang sama, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Tabel 6 menunjukkan bentuk pernyataan Sufmi Dasco Ahmad dan tanggal pemuatan berita di kedua media. Pernyataan Sufmi Dasco Ahmad adalah penting karena mewakili lembaga yang memiliki otoritas penting dalam pengesahan RUU DKJ. Namun demikian, tampak bahwa terdapat pernyataan yang sama (“Tetap begitu, dipilih oleh rakyat”) namun dimuat CNN Indonesia (8 Maret 2024) tiga hari setelah dimuat KOMPAS.com (5 Maret 2024). Dalam berita yang memuat

pernyataan Sufmi Dasco, CNN Indonesia menyajikan secara kronologis, mendalam, dan komprehensif hingga tiga halaman. Hal tersebut menjelaskan, mengapa informasi yang sama lebih lambat disajikan oleh CNN Indonesia.

Tabel 6: Pernyataan Aktor yang Muncul di KOMPAS.com dan CNN Indonesia

No	Pernyataan	Media	Tanggal
1	“Ya pokoknya dipilih oleh rakyat. Gitu saja”.	KOMPAS.com	5 Maret 2024
2	“Kan gini, kita kan sudah sebelum kemarin sudah ngomong. Bahwa itu dipilih oleh rakyat. DIM-nya itu sudah dipilih oleh rakyat”.	KOMPAS.com	5 Maret 2024
3	“Tetap begitu, dipilih oleh rakyat”.	KOMPAS.com	5 Maret 2024

Sumber: Olahan Peneliti

Stdi ini menemukan, adanya sebuah pernyataan yang dimuat dalam dua judul berita. Pada Tabel 7 berikut, tampak bahwa profil atau pernyataan aktor adalah tokoh-tokoh yang sentral dalam diskusi RUU DKJ. Misalnya, latar belakang aktor sebagai pakar hukum tata negara bisa menunjukkan objektivitas pandangan diantara para politisi yang memiliki silang kepentingan. Demikian pula pernyataan pimpinan DPR adalah penting untuk mengkonfirmasi dan memastikan status RUU DKJ.

Tabel 7: Repetisi Pernyataan yang Muncul dalam Dua Berita

Pernyataan	Aktor	Institusi	Media	Judul Berita	Tanggal
Harus segera membuat perppu untuk memastikan tadi bahwa kedudukan ibu kota IKN belum siap sehingga tetap di DKI sampai pada waktunya IKN siap sebagai ibu kota negara	Agus Riwanto	Pakar Hukum Tata Negara	CNN Indonesia	Pakar Hukum: Jakarta Sudah Kehilangan Status Ibu Kota	7 Maret 2024
				Buru-buru Menuju Daerah Khusus Jakarta	8 Maret 2024
Berarti Februari 2024 pas dua tahun, sekarang sudah Maret. Sejak saat itu, sebenarnya ibu kota kita tidak lagi DKI Jakarta	Agus Riwanto	Pakar Hukum Tata Negara	CNN Indonesia	Pakar Hukum: Jakarta Sudah Kehilangan Status Ibu Kota	7 Maret 2024
				Buru-buru Menuju Daerah Khusus Jakarta	8 Maret 2024
RUU DKI itu dia kehilangan statusnya tanggal 15 Februari kemarin. Kan itu implikasi dari Undang-undang IKN. Iya dua tahun [setelah UU IKN diundangkan]. Nah, [UU DKI] itu kan berakhir 15 Februari	Supratman Andi Agtas	Ketua Baleg DPR	CNN Indonesia	Ketua Baleg DPR: Berakhir, Tak Ada Status Sejak 15 Februari	5 Maret 2024
				Pakar Hukum: Jakarta Sudah	7 Maret 2024

				Kehilangan Status Ibu Kota		
Sekali lagi, karena dari awal draf kami, draf pemerintah sikapnya dan drafnya juga isinya sama, dipilih bukan ditunjuk	Tito Karnavi	Mendagri	CNN Indonesia	Tito: Pemerintah	13	
				Tolak Gubernur DKI Ditunjuk Presiden di RUU DKJ	Maret 2024	
				DPD Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden di RUU DKJ	13	Maret 2024
Ada satu isi yang di situ sangat mengecoh kalau saudara tidak hati-hati	Mahfud MD	Mantan Menkopolkam	KOMPAS .com	Mahfud Sebut Isi RUU DKJ Mengechkan, Presiden Bisa Cawe-cawe Pilih Gubernur Jakarta	1	Maret 2024
				DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat, Bukan Presiden	5	Maret 2024
Sekarang kesepakatan sementara itu nanti Gubernur DKJ akan dipilih dua nama oleh DPR lalu diserahkan kepada Presiden. Presiden tentukan satu. Ini berpotensi akan kronisme lagi	Mahfud MD	Mantan Menkopolkam	KOMPAS .com	Mahfud Sebut Isi RUU DKJ Mengechkan, Presiden Bisa Cawe-cawe Pilih Gubernur Jakarta	1	Maret 2024
				DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat, Bukan Presiden	5	Maret 2024
Masyarakat harus tetap menolak, ini akal-akalan baru untuk ikut cawe-cawe tidak jujur di dalam pemilihan Gubernur Jakarta	Mahfud MD	Mantan Menkopolkam	KOMPAS .com	Mahfud Sebut Isi RUU DKJ Mengechkan, Presiden Bisa Cawe-cawe Pilih Gubernur Jakarta	1	Maret 2024
				DPR Tegaskan Gubernur	5	Maret 2024

					Jakarta Tetap Dipilih Rakyat, Bukan Presiden
Oleh sebab itu masyarakat harus mengawal dan saya berharap kepada partai-partai besar tetap menolak gagasan pemlihan kecuali pemilihan langsung seperti biasa. Itu harus kita kawal bersama untuk demokrasi dan keadilan kita	Mahfud MD	Mantan Menkopol hukum	KOMPAS .com	Mahfud Sebut 1 Maret Isi RUU DKJ 2024 Mengecohkan, Presiden Bisa Cawe-cawe Pilih Gubernur Jakarta	
					DPR Tegaskan 5 Maret Gubernur 2024 Jakarta Tetap Dipilih Rakyat, Bukan Presiden

Sumber: Olahan Peneliti

Ekologi dan Wacana Argumentatif pada KOMPAS.com dan CNN Indonesia

Ekologi media menjelaskan karakter, gaya narasi, perspektif, hingga sentimen media. Hal ini menjelaskan, mengapa gaya argumentasi atau pernyataan aktor tertentu dimuat atau tidak ada dalam sebuah berita. Dalam konteks berita politik, kajian tentang analisis wacana memberi perhatian pada gaya argumentasi metafora (Musolff, 2004). Metafora memiliki penggunaan retorik dan persuasif yang signifikan dalam wacana politik. Dalam pemberitaan mengenai RUU DKJ, media menggunakan metafora untuk menggambarkan perjuangan atau konflik politik yang terjadi. Kata-kata kiasan aktor politik seperti “mengkebiri” atau “tarik ulur” mempermudah audiens dalam memahami isu. Audiens juga menangkap dramatisasi atau kompetisi sebuah peristiwa politik, alih-alih sebagai perdebatan kebijakan yang bersifat teknis.

Sedangkan gaya argumentasi alur cerita menjadi konstruksi naratif yang diulang secara teratur. Alur cerita berfungsi untuk menghubungkan bagian-bagian dari berbagai wacana yang disederhanakan. Alur cerita dapat memuat informasi berupa proses, lingkup, penyebab, dan keterlibatan para aktor. Media menggunakan alur cerita untuk membuat isu-isu yang kompleks menjadi lebih menarik dan mudah dicerna oleh audiens.

KOMPAS.com dan CNN Indonesia membingkai diskusi politisi terkait RUU Daerah Khusus Jakarta sebagai sebuah konflik antara pemerintah penguasa dan pihak yang memperdulikan keajegan konstitusi. Alur cerita kemudian membantu audiens memahami perkembangan isu dari waktu ke waktu. Bahkan, alur cerita dapat mengesankan persepsi publik untuk melihat siapa aktor yang “benar” atau “salah”, siapa aktor yang berusaha “taat konstitusi” atau berusaha “memanipulasi konstitusi”. KOMPAS.com dan CNN Indonesia juga menggunakan alur cerita secara proporsional. Artinya, kedua media memuat pernyataan pihak-pihak yang pro dan kontra.

Proliferasi media KOMPAS.com dan CNN Indonesia juga tampak dalam sajian konten yang beragam dan terus diperbarui. Meskipun KOMPAS.com dan CNN Indonesia meliput isu yang sama, namun keduanya memiliki pendekatan gaya narasi dan pemilihan sumber yang berbeda. KOMPAS.com dengan jumlah artikel yang lebih banyak, lebih sering menonjolkan narasi yang mendukung pandangan tertentu. Sementara, CNN

Indonesia menampilkan narasi yang lebih beragam dan mendalam dengan gaya komunikasi yang berbeda.

Proliferasi media berimplikasi pada cara audiens memahami isu yang kompleks - termasuk pada diskusi tentang RUU DKJ. Audiens yang hanya mengandalkan satu media akan mendapatkan pandangan yang terbatas. Sementara, audiens yang mengeksplorasi lebih banyak media akan mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh. Meskipun, audiens juga akan berpotensi mengalami kebingungan karena limpahan informasi yang tidak terbatas (White, 2022).

KESIMPULAN DAN SARAN

Pemahaman tentang ekologi media penting untuk memahami bahwa media dapat membentuk opini publik. Pengelola media atau jurnalis memiliki kekuasaan untuk menentukan aktor atau pernyataan. Demikian pula, aktor politik dapat menggunakan gaya tertentu untuk menyatakan argumentasi. Pemahaman atas ekologi media akan bermanfaat pada kepekaan, ketahanan, dan daya kritis dalam membaca diskursus sosial.

Penelitian selanjutnya dapat mengkaji ekologi media pada media sosial atau isu-isu publik lain. Pada media dan isu yang berbeda, peneliti selanjutnya dapat menemukan karakter, sentimen, atau gaya narasi media yang khas. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan *Discourse Coalition Framework* tidak hanya untuk menganalisis jumlah berita atau pernyataan narasumber. Tetapi, *Discourse Coalition Framework* juga dapat digunakan untuk memahami cara narasi dibentuk dan mempengaruhi audiens.

REFERENSI

- Abu-Ayyash, S. (2024). Mediatized politics in Palestine: Online platforms' influence on framing of politicians' messages. *Communication and the Public*, 9(1), 100–113. <https://doi.org/10.1177/20570473231224820>
- Dame Laoera, B., & Wibowo, T. O. (2023). Indonesian online news and digital culture: a media ecology perspective. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, 7(2), 355–368. <https://doi.org/10.25139/jsk.v7i2.6190>
- Gil de Zúñiga, H., Strauss, N., & Huber, B. (2020). The Proliferation of the “News Finds Me” Perception Across Societies. *International Journal Of Communication*, 14.
- Glynos, J., David Howarth, Aletta Norval, & Ewen Speed. (2009). *Discourse Analysis: Varieties and Methods*. https://eprints.ncrm.ac.uk/id/eprint/796/1/discourse_analysis_NCRM_014.pdf
- Hajer, M. (2002). discourse analysis and the study of policy making. *European Political Science*, 2(1), 61–65. <https://doi.org/10.1057/eps.2002.49>
- Hamad, I. (2004). KONSTRUKSI REALITAS POLITIK DALAM MEDIA MASSA (Studi Pesan Politik Dalam Media Cetak Pada Masa Pemilu 1999). *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 8(1), 21. <https://doi.org/10.7454/mssh.v8i1.77>
- Haryanto, A. T. (2024, January 31). *APJII: Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang*. <https://inet.detik.com>. <https://inet.detik.com/cyberlife/d-7169749/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>
- Kasih, P. C. (2023). PERTARUNGAN WACANA KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG DALAM MEDIA ONLINE. *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO: Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi Dan Informasi*, 8(1), 19–34. <https://doi.org/10.52423/jikuho.v8i1.15>
- Katadata Insight Center. (2023a, June 15). *Inilah Media yang Paling Dipercaya Warga Indonesia pada 2023, Ada Favoritmu?*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/media/statistik/1c1e7d566a730a9/inilah-media-yang-paling-dipercaya-warga-indonesia-pada-2023-ada-favoritmu>

- Katadata Insight Center. (2023b, November 14). *Survei KIC: Mayoritas Anak Muda Indonesia Sering Terpapar Berita Politik*. Databoks.
- Kemp, S. (2024, February 21). *DIGITAL 2024: INDONESIA*. <https://Datareportal.Com>. <https://datareportal.com/reports/digital-2024-indonesia>
- Komala, R. (2024). Jejaring Wacana pada Debat Kebijakan Publik di DPR RI: Isu Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Komunikasi Global*, 13(1), 175–198. <https://doi.org/10.24815/jkg.v13i1.36954>
- Kortti, J. (2017). Media History and the Mediatization of Everyday Life. *Media History*, 23(1), 115–129. <https://doi.org/10.1080/13688804.2016.1207509>
- Leifeld, P. (2016). Discourse Network Analysis: Policy Debates as Dynamic Networks . In *The Oxford Handbook of Political Networks* (pp. 301–325). Oxford University Press.
- Lubis, A. Y., Esfandiary, D., & Bonifasius S, P. (2024). ANALISIS JARINGAN GERAKAN OPINI DIGITAL MENGENAI KEBIJAKAN ELON MUSK DI MEDIA SOSIAL X PADA TAGAR #TWITTERLAYOFFS. *BroadComm*, 6(1), 51–63. <https://doi.org/10.53856/bcomm.v6i1.350>
- Made, S. K. A., Ohorella, N. R., & Nasher, A. (2024). BRANDING DESTINASI PARIWISATA BALI PADA AKUN INSTAGRAM @WISATABALI_OFFICIAL. *BroadComm*, 6(1), 38–49. <https://doi.org/10.53856/bcomm.v6i1.349>
- Modgil, S., Singh, R. K., Gupta, S., & Dennehy, D. (2024). A Confirmation Bias View on Social Media Induced Polarisation During Covid-19. *Information Systems Frontiers*, 26(2), 417–441. <https://doi.org/10.1007/s10796-021-10222-9>
- Musolff, A. (2004). *Metaphor and Political Discourse*. Palgrave Macmillan UK. <https://doi.org/10.1057/9780230504516>
- Nurhaqiqi, H. (2022). Media Ecology Activism The Media Coverage of COVID-19 and its Responses. *Metafora: Education, Social Sciences and Humanities Journal*, 6(1), 1–10.
- Reuters Institute. (2023). *Digital News Report 2023*. <https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2023>
- Setiadarma, D., & Rizkiansyah, M. (2021). Media convergence of the Indonesian house representative television. *Journal Communication Spectrum: Capturing New Perspectives in Communication*, 11(1), 74–83.
- Sofura, A. M. (2023). Discourse Network Analysis: Studi Kasus pada Kebijakan Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina. *Jurnal Komunikatif*, 12(1), 37–50. <https://doi.org/10.33508/jk.v12i1.4526>
- White, A. (2022). Overcoming ‘confirmation bias’ and the persistence of conspiratorial types of thinking. *Continuum*, 36(3), 364–376. <https://doi.org/10.1080/10304312.2021.1992352>